

No. Katalog : 4601003.52

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

NUSA TENGGARA BARAT 2015



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat*

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

NUSA TENGGARA BARAT 2015

<http://ntb.bps.go.id>



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat*

<http://ntb.bps.go.id>

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

ISBN : 978-602-1059-23-4

No. Publikasi : 525320.1602

Katalog BPS : 4601003.52

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016

vi + 43 halaman; 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kata Pengantar

Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 merupakan publikasi yang bertujuan menyediakan data dan informasi tentang situasi politik di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gambaran situasi politik yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Kabupaten/Kota, Pemilihan legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden.

Data dan informasi tersebut dapat memberikan gambaran kejadian perpolitikan di Daerah Nusa Tenggara Barat. Dari gambaran itu dapat menjadi bahan kajian perpolitikan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bahkan data dan informasi dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan strategi perpolitikan ke depan.

Publikasi ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan lainnya. Penyajian data dan informasi lebih khusus dan sederhana dan lebih mudah dipahami oleh pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan ini diucapkan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada penerbitan publikasi selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pembaca.

Mataram, Nopember 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Endang Tri Wahyuningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II METODOLOGI	
2.1. Sumber Data	5
2.2. Konsep dan Definisi	5
BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9
BAB IV STATISTIK POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
Pemilukada (Gubernur/Wakil Gubernur) Provinsi NTB Tahun 2013	14
Pemilu Legislatif Tahun 2014.....	20
Pemilu Presiden Tahun 2014	33
Pemilukada Kabupaten/Kota Tahun 2015	37

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 3.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi NTB Tahun 2015	10
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi NTB Tahun 2015	11
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Provinsi NTB Tahun 2015	12
Tabel 4.1	Hasil Rekapitulasi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB Tahun 2013	19
Tabel 4.2:	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi NTB	22
Tabel 4.3:	Partisipasi pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi NTB	23
Tabel 4.4	Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat Tahun 2014	26
Tabel 4.5	Perolehan Suara Sah Anggota DPD Nusa Tenggara Barat Tahun 2014	26
Tabel 4.6	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat	27
Tabel 4.7	Perolehan Kursi Partai Politik masing-masing Dapil Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2014	29
Tabel 4.8	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Partrai Politik Tahun 2014	32
Tabel 4.9	Rekapitulasi Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Prov. NTB	34
Tabel 4.10:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi NTB	35
Tabel 4.11	Nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015	38

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Hal
Gambar 4.1	Hasil Pemilihan Kepala Daerah NTB Tahun 2013	17
Gambar 4.2	Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat	24
Gambar 4.3	Persentase Perolehan Suara sah Pemilihan Umum Calon Presiden/Wakil Presiden periode 2014-2019	36
Gambar 4.4.	Gambar 4.4 Hasil Rekapitulasi Perorelahan Suara Masing-masing Calon Pasangan Pemilukada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provi nsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015.....	40

<http://ntb.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpolitikan di Indonesia mengalami sejarah yang panjang. Di mulai dari masa prakolonial, kolonial, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan reformasi. Masa-masa tersebut banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik demi perbaikan sistem politik di Indonesia. Setiap perjalanan perpolitikan tersebut memberikan pelajaran dan pengetahuan politik yang cukup banyak dan berarti. Kelemahan dan kekurangan politik di Indonesia di setiap masa selalu muncul. Pada akhir masa selalu diwarnai demonstrasi yang dimotori oleh kaum muda. Kontribusi kaum muda terhadap perubahan politik di Indonesia sangat besar. Keinginan perubahan kaum muda menuju perbaikan politik di Indonesia.

. Potret terakhir masa sistem politik orde baru yang masih terkenang adalah kekuasaan penyelenggaraan negara tersentral di pusat. Hampir semua kebijakan menjadi kekuasaan pemerintahan pusat. Bahkan bisa di sebut kekuasaan otoriter. Ini menjadi sorotan kaum muda. Keinginan melakukan perubahan dilakukan kaum muda pada tahun 1998. Dengan semangat perubahan yang disebut reformasi terus dikibarkan oleh kaum muda. Pada akhirnya masa orde baru tumbang. Sejak itu secara perlahan banyak perubahan perpolitikan di Indonesia.

Kekuasaan penyelenggaraan negara tidak lagi seluruhnya tersentral di pusat, yang menjadi tuntutan reformasi. Secara perlahan kekuasaan/kewenangan antara daerah dengan pusat diatur berdasarkan kepentingan rakyat. Perubahan-perubahan kekuasaan/kewenangan tersebut dilandasi atas amandemen Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan memperjelas amandemen UUD 1945.

Pengaruh amandemen UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, sebagai berikut :

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU (pasal 2 ayat 1).

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah/menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1).
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik Presiden dan Wakil Presiden (pasal 3 ayat 1).
5. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1).
6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7).
7. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD (pasal 22E ayat 2).
8. Adanya keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pada Tahun 2001 setelah melalui beberapa penggunaan hak DPR, MPR memutuskan untuk melakukan pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Di samping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk muncul sehingga membuat jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya konstanta berjumlah tiga, bertambah hingga 48 partai pada Pemilu Tahun 1999, dan terus berubah pada Pemilu-Pemilu selanjutnya. Banyaknya jumlah partai politik yang ada di parlemen dianggap cukup menyita energi pemerintah untuk permasalahan politik sehingga berdampak pada kinerja. Implikasinya, pada Pemilu 2009 terdapat gagasan untuk membatasi jumlah Partai Politik di Parlemen dengan memberlakukan *parliamentary threshold* (PT). Ketentuan PT pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak 2,5% dan pada Pemilu 2014 bertambah menjadi 3,5 %.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan Pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi *civil society*. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh-puluh tahun mengalami domestikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dengan sistem *zipper* (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam undang-undang pemilihan umum.

Dinamika politik juga terjadi di Daerah Nusa Tenggara Barat. Deretan kegiatan politik di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah terjadi. Keadaan terakhir ajang politik di daerah Nusa Tenggara Barat adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013, pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden/wakil presiden tahun 2014 serta Pilkada serentak di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbagai fenomena politik yang terjadi dicatat, di dokumentasi dan ditampilkan secara berkala.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan publikasi Statistik Politik 2015 ini adalah untuk menghimpun dan menampilkan data statistik politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala yang dapat dibandingkan antar waktu. Publikasi ini juga memberikan gambaran perkembangan perpolitikan di daerah Nusa Tenggara Barat.

1.3 Ruang Lingkup

Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 mencakup data-data yang terkait dengan politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten/Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 membicarakan metodologi yang membahas sumber data, dan konsep dan definisi. Bab 3 mengulas mengenai gambaran umum daerah Nusa Tenggara Barat. Bab 4 tentang statistik politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mengulas perjalanan pesta demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari bahasan tentang Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 2013, Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu presiden dan wakil presiden 2014 serta Pilkada Bupati/wakil bupati/Walikota/wakil walikota tahun 2015.

BAB II METODOLOGI

Bab kedua ini membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Konsep dan definisi diperlukan pula untuk memberikan pengertian yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

2.1 Sumber Data

Data publikasi Statistik Politik ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Sekretariat DPRD dan sumber lainnya.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2015, diperlukan pembatasan konsep dan definisi yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan definisi dari data-data yang ditampilkan.

Calon Perseorangan adalah seorang yang menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa melalui partai politik. Calon independen mulai dikenal melalui UU No. 12/2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Calon Legislatif (Caleg) adalah kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Calon Presiden/ Wakil Presiden adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden (UU No.42/2008).

Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pembagian wilayah pada Pemilu legislatif. Pada setiap Dapil dialokasikan sejumlah kursi tertentu yang akan diperebutkan oleh peserta pemilu.

Daftar Calon Tetap (DCT) adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada Pemilu legislatif tingkat Pusat, daerah, dan DPD.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilu yang berkedudukan sebagai anggota MPR. Anggota DPD berjumlah masing-masing empat orang pada setiap provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32/2004).

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua; konvensional seperti memilih dalam Pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah serta DPRD (UU No.32/2004).

Pemekaran Daerah adalah pembentukan wilayah administratif pemerintahan baru dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.

Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang terdiri dari presiden, kabinet, dan lembaga-lembaga pembantu presiden.

Pemilih adalah warga negara Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU No.10/2008).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.22/2007).

Penduduk adalah warga negara Provinsi Nusa Tenggara Barat atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

<http://ntb.bps.go.id>

BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Posisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada 115°46' – 119°05' Bujur Timur dan 8°10' – 9°05' Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi dan berada di kawasan Timur Indonesia, yang terletak diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gora (Gogo-Rancah) artinya bumi yang dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun di daerah basah.

Letak NTB yang berbatasan langsung dengan daerah tujuan wisata dunia yaitu Provinsi Bali, sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang sangat bagus pemandangan alam dan pantainya. Seperti : Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Lakey dan obyek wisata lainnya.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,15 km², terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali luas Pulau Lombok. Sebanyak 280 pulau terdapat di Provinsi NTB dan baru 32 pulau yang berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan 116 kecamatan dan 1.171 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa mempunyai jumlah kecamatan yang paling banyak, yaitu 24 kecamatan dan Kabupaten yang paling banyak mempunyai jumlah desa/kelurahan, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa/kelurahan.

Persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata baik antar pulau maupun kabupaten/kota. Penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.164.018 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 133.391 jiwa. Dengan luas wilayah yang lebih sempit, Pulau Lombok dihuni oleh 3,394 juta jiwa atau sekitar 70,20 persen dari jumlah penduduk di Nusa

Tenggara Barat dan pulau Sumbawa yang lebih luas hanya dihuni oleh sekitar 1,441 juta jiwa atau 30 persen dari jumlah penduduk NTB.

Tabel 3.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Di Provinsi NTB Tahun 2015

Kab/Kota	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	1.053,92	10	122	654,892	621
Lombok Tengah	1.208,40	12	139	912,879	755
Lombok Timur	1.605,55	20	254	1,164,018	725
Sumbawa	6.643,98	24	166	441,102	66
Dompu	2324,6	8	81	238,386	103
Bima	4.389,40	18	193	468,682	107
Sumbawa Barat	1.849,02	8	65	133,391	72
Lombok Utara	809,53	5	33	212,265	262
Kota Mataram	61,30	6	80	450,226	7,345
Kota Bima	222,25	5	38	159,736	719
NTB	20.153,15	116	1,171	4,835,577	240

Sumber : BPS NTB

Berdasarkan data hasil Proyeksi Penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.835.577 jiwa. Kabupaten yang paling banyak penduduknya adalah Kabupaten Lombok Timur, mencapai 1.164.018 jiwa. Kemudian disusul Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 912.879 jiwa dan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 654.892 jiwa. Sementara itu untuk Kabupaten Lombok Utara hanya sebanyak 212.265 jiwa.

Ternyata jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, dengan rincian laki-laki sebanyak 2.345.811 jiwa dan perempuan sebanyak 2.489.766 jiwa. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,22, yang berarti dari 100 perempuan ada sekitar 94 laki-laki.

Dapat dilihat dari tabel, bahwa terjadi perbedaan komposisi jenis kelamin antar kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin paling rendah terjadi di Kabupaten Lombok Timur, yaitu hanya sebesar 87,14 persen. Ini berarti setiap 100 perempuan terdapat 87 laki-laki. Yang jelas di Kabupaten

Lombok Timur jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Sementara itu, 3 (tiga) Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Sumbawa Barat mempunyai rasio jenis kelamin di atas 100. Artinya tiga kabupaten tersebut jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Jika dilihat dari komposisi umur, Nusa Tenggara Barat tergolong penduduk muda. Ini ditunjukkan pada komposisi kelompok umur 0-14 tahun cukup banyak, yaitu sebanyak 1,4 juta anak atau sekitar 30 persen. Dilihat dari angka ketergantungan, NTB mempunyai angka ketergantungan cukup tinggi, karena dari 100 orang produktif menanggung sekitar 54 orang tidak produktif. Kondisi ini terjadi di semua kabupaten/kota.

TABEL 3.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JK
LOMBOK BARAT	320,103	334,789	654,892	95.61
LOMBOK TENGAH	431,825	481,054	912,879	89.77
LOMBOK TIMUR	542,012	622,006	1,164,018	87.14
SUMBAWA	224,974	216,128	441,102	104.09
DOMPU	120,521	117,865	238,386	102.25
BIMA	233,288	235,394	468,682	99.11
SUMBAWA BARAT	67,525	65,866	133,391	102.52
LOMBOK UTARA	104,573	107,692	212,265	97.10
KOTA MATARAM	222,596	227,630	450,226	97.79
KOTA BIMA	78,394	81,342	159,736	96.38
NUSA TENGGARA BARAT	2,345,811	2,489,766	4,835,577	94.22

Sumber : Daerah Dalam Angka NTB Tahun 2015

TABEL 3.3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

KABUPATEN/KOTA	0-14	15-64	65+	JUMLAH	ANGKA KETERGANTUNGAN
LOMBOK BARAT	192,747	432,228	29,917	654,892	51.52
LOMBOK TENGAH	268,746	598,187	45,946	912,879	52.61
LOMBOK TIMUR	357,365	748,617	58,036	1,164,018	55.49
SUMBAWA	129,414	288,747	22,941	441,102	52.76
DOMPU	82,196	146,542	9,648	238,386	62.67
BIMA	154,062	287,589	27,031	468,682	62.97
SUMBAWA BARAT	41,202	85,991	6,198	133,391	55.12
LOMBOK UTARA	64,406	138,043	9,816	212,265	53.77
KOTA MATARAM	119,040	313,044	18,142	450,226	43.82
KOTA BIMA	45,530	106,625	7,581	159,736	49.81
NUSA TENGGARA BARAT	1,454,708	3,145,613	235,256	4,835,577	53.72

Sumber : Daerah Dalam Angka NTB Tahun 2015

IV
STATISTIK POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

<http://ntb.bps.go.id>

PEMILUKADA (GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR) PROVINSI NTB

TAHUN 2013



PILGUB NTB 2013


PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB**

SENIN, 13 MEI 2013

<p>1</p>  <p>1. H. H. H. H. Dewi Haryati, M.P. 2. H. H. H. Samsudin, M.P.</p>	<p>2</p>  <p>1. H. H. H. Purwati, S.P. 2. H. H. H. Andriani, S.P.</p>	<p>3</p>  <p>1. H. H. H. Rahmat, S.P. 2. H. H. H. Siti, S.P.</p>	<p>4</p>  <p>1. H. H. H. Muhlis, S.P. 2. H. H. H. Muhammad Fauzan, S.P.</p>
--	--	---	---

A. Sejarah Gubernur NTB

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan pun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR. Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal

sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Bulan Periode tahun 2009 – 2014, Provinsi NTB dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya yaitu Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi berpasangan dengan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pasangan ini mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing. Banyak program pembangunan yang diluncurkan, terutama program pengentasan kemiskinan. Prestasi terbaiknya adalah penghargaan penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat (Pilkada) Periode Tahun 2013 - 2018

Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2013. Sebelum pelaksanaan Pilkada tersebut terjadi proses persiapan yang panjang. Salah satu prosesnya adalah Diakhir pleno, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT untuk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur periode 2013-2018 sebanyak 3.478.892 jiwa, yang terdiri dari sebanyak 1.691.563 jiwa laki-laki dan 1.787.329 jiwa

perempuan. Rinciannya, pemilih di Kota Mataram sebanyak 294.894 jiwa terdiri dari 143.417 jiwa laki-laki dan 151.477 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Barat sebanyak 456.211 jiwa, terdiri dari 224.832 jiwa laki-laki dan 231.379 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Utara sebanyak 155.468 jiwa, terdiri dari 76.750 jiwa laki-laki dan 78.718 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 699.949 jiwa, terdiri dari 338.116 jiwa laki-laki dan 361.833 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Timur sebanyak 868.743 jiwa, terdiri dari 416.597 jiwa laki-laki dan 452.146 jiwa perempuan. Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 92.403 jiwa, terdiri dari 45.057 jiwa laki-laki dan 47.346 jiwa perempuan. Kabupaten Sumbawa sebanyak 325.855 jiwa, terdiri dari 159.755 jiwa laki-laki dan 166.100 jiwa perempuan. Kabupaten Dompu sebanyak 149.262 jiwa, terdiri dari 73.295 jiwa laki-laki dan 75.967 jiwa perempuan. Kabupaten Bima sebanyak 331.624 jiwa, terdiri dari 163.093 jiwa laki-laki dan 168.531 jiwa perempuan. Pemilih di Kota Bima sebanyak 104.483 jiwa, terdiri dari 50.651 jiwa laki-laki dan 53.832 jiwa perempuan. Sebanyak 3,4 juta lebih pemilih itu akan menyalurkan hak pilihnya pada 8.922 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 1.137 desa, 116 kecamatan, 10 kabupaten/kota.

Tahapan selanjutnya adalah pembukaan pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur. Pada pilgub NTB 2013, ada lima bakal calon yang mendaftarkan diri. Salah satu bakal calon yang mendaftar melalui jalur independen, Lalu Ranggalawe dan Ahmad Mukhlis (LARIS). Sedangkan 4 pasangan lainnya didukung oleh partai politik. Pada tanggal 25 Maret 2013, KPU menetapkan 4 pasangan cagub/cawagub untuk pilgub NTB. Pasangan LARIS tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat. Jadi yang bertarung dalam pilgub adalah:

1. TGH. M. Zainul Majdi dan Muhammad Amin (TGB-Amin) yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra.
2. Harun Al Rasyid dan TGH. L. Muhyi Abidin (Harum) yang diusung oleh Partai Hanura, PNBK Indonesia, PPD, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partra Barnas, Partai kedaulatan dan PKPI.

3. DR. K.H. Zulkifli Muhadli dan Prof. DR. H. Muhammad Ichsan (Zul-Ichsan) diusung oleh Partai Bulan Bintang, PKNU, PKPB dan PPPI.
4. H. Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihin (SJP-Jo) diusung oleh PKS, PBR dan PPRN.

Gambar 4.1. Hasil Pemilihan Kepala Daerah NTB Tahun 2013



1.038.638 (44,37 %)



183.823
(7,85 %)



498.420 (21,28 %)



620.611 (36,50 %)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan KH Muhammad Zainul Majdi-M Amin (TGB-Amin) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Kemenangan pasangan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

yang diselenggarakan KPU NTB, Kamis (23/5). "Dari hasil rakapitulasi penghitungan suara KPU NTB menetapkan pasangan nomor urut satu TGB Amin unggul pada Pilgub NTB," kata Ketua KPU NTB Fauzan Khalid. Dari 2.341.492 jumlah suara yang sah, TGB-Amin meraih 1.038.638 suara (44,37%), menyusul pasangan Zulkifli Muhadly-Muhammad Ichsan (Zul-Ichsan) dengan 620.611 suara (26,50%), Harun Al Rasyid-H. Lalu Muhyi Abidin 498.420 suara (21,28%), dan pasangan Suryadi Jaya Purnama-Johan Rosihan meraih 183.823 suara (7,85%). Dengan komposisi perolehan suara itu, KPU NTB menetapkan pasangan TGB-Amin sebagai calon terpilih dalam Pilgub NTB untuk periode 2013/2018.

Tabel : 4.1 Hasil Rekapitulasi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB Tahun 2013

Kandidat	Partai	Suara	%
TGB M. Zainul Majdi - Muhammad Amin	<u>Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, Partai Gerindra, PKB</u>	1.038.638	44,37 %
Suryadi Jaya Purnama - Johan Rosihan	<u>PKS, PBR, PPRN</u>	183.823	7,85 %
Harun Al Rasyid - Lalu Abdul Muhyi Abidin	<u>Partai Hanura</u>	498.420	21,28 %
Zulkifli Muhadli - Muhammad Ichsan	<u>PBB, PKNU, PKPB, PPPI</u>	620.611	36,50%
Tidak sah/golput		109.594	
Total		2.341.492	100 %
Pemilih terdaftar		3.478.441	
Sumber: KPUD NTB			

PEMILU LEGISLATIF 2014



C. Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara maka bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat maka pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi.

Sebagai perwujudan bahwa pemerintah telah menjamin hak-hak asasi warga, termasuk Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam terselenggaranya Pemilu Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014. Dimana masyarakat Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 April 2014 telah menentukan pilihannya atau memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, baik pusat maupun daerah.

Persiapan proses Pileg 2014 di Nusa Tenggara Barat cukup panjang. Dari perbaikan daftar pemilih Pileg, pendaftaran partai politik dan pendaftaran calon legislatif. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan oleh lembaga pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat.

Hasil dari perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi NTB yang ditetapkan oleh KPU RI dengan Berita Acara Nomor: 16/BA//2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi NTB

(ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2014)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	KOTA MATARAM	997	140.038	148.626	288.664
2	LOMBOK BARAT	1,707	231.860	238.963	470.823
3	LOMBOK UTARA	518	79.198	80.916	160.114
4	LOMBOK TENGAH	2,232	349.607	366.040	715.647
5	LOMBOK TIMUR	3,077	376.120	433.519	809.639
6	SUMBAWA BARAT	332	44.314	44.540	88.854
7	SUMBAWA	1,158	161.414	166.840	328.254
8	DOMPU	577	75.803	78.240	154.043
9	BIMA	1,069	172.225	178.213	350.438
10	KOTA BIMA	353	49.290	52.485	101.775
TOTAL		12.020	1.679.869	1.788.382	3.468.251

Sumber: Dokumen Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Prov.NTB, 2014

Jumlah pemilih pada Pileg 2014 di Nusa Tenggara Barat berjumlah 3.468.251 orang yang tersebar di 12.020 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, pemilih Pileg 2014 perempuan lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin pileg 2014 sebesar 93,93, artinya dari 100 pemilih perempuan terdapat sekitar 94 pemilih laki-laki.

Partisipasi Pemilih

Implementasi sosialisasi yang digambarkan di atas, telah memberi kontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 77,32 %. Adapun gambaran partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif 2014 masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada table.

Tabel 4.3 : Partisipasi pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi NTB

NO	Kab/Kota	Jumlah Pemilih terdaftar (DPT, DPTB, DPK, DPKTb)	Pengguna hak pilih	Partisipasi (%)
1	Kota mataram	299.678	218.057	77,76
2	Kab.Lombok Barat	486.004	373.027	76,75
3	Kab.Lombok Utara	162.882	128.692	79,01
4	Kab.Lombok Tengah	728.968	548.816	75,29
5	Kab.Lombok Timur	838.448	655.681	78,20
6	Kab.Sumbawa Barat	92.569	76.058	82,16
7	Kab.Sumbawa	334.785	264.178	78,91
8	Kab.Dompu	159.621	133.583	83,69
9	Kab.Bima	360.310	274.348	76,14
10	Kota Bima	106.275	87.642	82,47
Jumlah		3.569.540	2.760.082	77,32

Sumber : Dokumen Subag teknis dan Hubmas KPU NTB, 2014

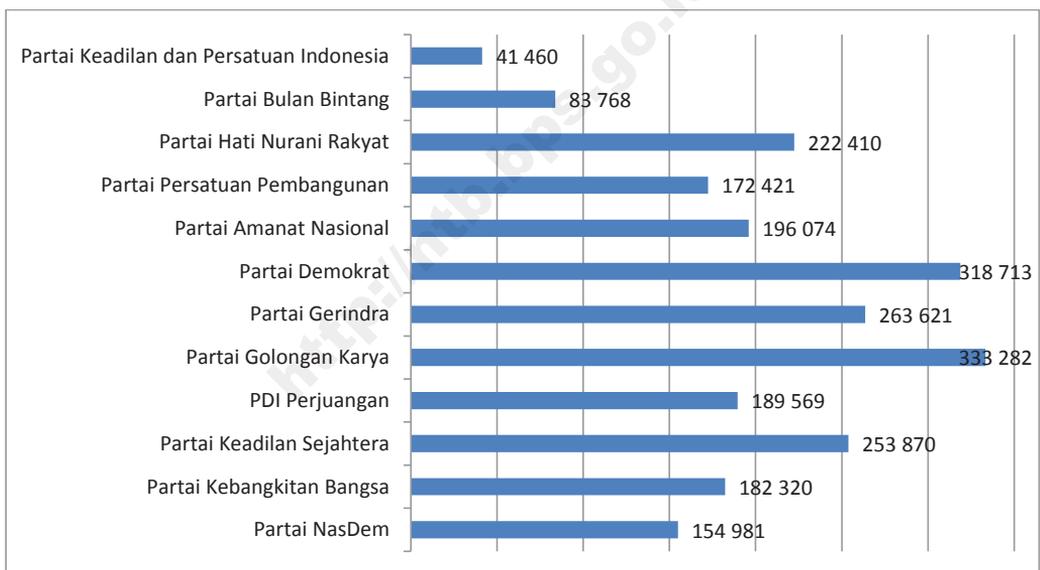
Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka partisipasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 83,69 %. Sedangkan angka partisipasi terendah ada di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 75,25 %. Terlihat pula secara geografis, kabupaten/kota yang berada di pulau Sumbawa (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima) memiliki angka partisipasi yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang ada di pulau Lombok (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur). Hanya satu

kabupaten di pulau Sumbawa yang memiliki angka partisipasi rendah yakni kabupaten Bima 76,14 %, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lombok Tengah 75,29 %.

- **Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014**

Perolehan Suara Sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti pada gambar 4.2. Partai Golongan Karya paling banyak memperoleh suara, yaitu sebanyak 333.282 (13,81%) suara, disusul Partai Demokrat sebanyak 318.713 (13,21%) suara. Perolehan suara sah Partai Politik Pileg 2014 anggota DPR RI selengkapnya seperti gambar 4.2.

Gambar 4.2 Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Bagian Teknis Pemilu KPU NTB 2014

Dapil NTB mendapat jatah 10 kursi DPR RI. Berikut ini data pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di provinsi tersebut:

- Jumlah pemilih: 3.569.539 orang
- Pengguna hak pilih: 2.760.081 orang

- Jumlah suara sah: 2.412.489
- Jumlah suara tidak sah: 347.592
- Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) = 241.249 (2.412.489 suara / 10 kursi)

Proses pembagian kursi dan penetapan caleg terpilih

- Tahap pertama, mencari partai politik yang perolehan suaranya melebihi BPP (241.249 suara). BPP sama dengan 1 kursi.
- Ternyata ada empat partai politik yang memenuhi syarat di atas (lihat tabel), yaitu Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKS. Empat partai ini otomatis memperoleh masing-masing 1 kursi, dan masih memiliki sisa suara, yaitu Golkar 92.033, Demokrat 77.464, Gerindra 22.372, dan PKS 12.621. Sisa suara ini akan digunakan untuk pembagian kursi tahap kedua.
- Tahap kedua, sisa 6 kursi dibagi untuk partai politik sesuai dengan urutan perolehan suara dan / atau sisa suara.
- Peringkat 5-10, yaitu Hanura, PAN, PDIP, PKB, PPP, dan NasDem, masing-masing memperoleh 1 kursi, karena perolehan suaranya melebihi sisa suara Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKS.
- Dengan demikian, 10 kursi terbagi rata untuk semua partai politik kecuali PBB dan PKPI. Setiap partai politik hanya memperoleh 1 kursi di DPR RI.
- Tahap ketiga, mencari caleg dengan perolehan suara tertinggi untuk setiap partai politik yang memperoleh kursi.

Dari proses tersebut, maka terpilih 10 anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019. Dari 10 anggota DP RI Nusa Tenggara Barat, hanya 1 (satu) orang perempuan yang terpilih untuk duduk di DPR RI, yaitu Dra. Hj. ErmalenaMHS. Nama-nama terpilih sebagai anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 : Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat Tahun 2014

Rank	Partai Politik	Suara	Caleg Terpilih	Suara
1	Golkar	333.282	H Muhammad Luthfi SE	59.074
2	Demokrat	318.713	HM Syamsul Luthfi	83.638
3	Gerindra	263.621	H Wilgo Zainar	55.192
4	PKS	253.870	H Fahri Hamzah SE	125.083
5	Hanura	222.410	Lalu Gde Syamsul Mujahidin SE	71.211
6	PAN	196.074	H Muhammad Syafrudin ST MM	62.292
7	PDIP	189.569	H Rachmat Hidayat SH	62.987
8	PKB	182.320	Ir Helmy Faishal Zaini	69.542
9	PPP	172.421	Dra Hj Ermalena MHS	49.314
10	Nasdem	154.981	Dr H Kurtubi SE MSp MSc	37.889
11	PBB	83.768	–	–
12	PKPI	41.460	–	–
	Jumlah suara sah	2.412.489		

NB: Muhammad Luthfi, Fahri Hamzah, Muhammad Syafrudin, dan Rachmat Hidayat merupakan calon incumbent.

- **Pemilihan Anggota DPD Nusa Tenggara Barat**

Setelah rekapitulasi penghitungan suara untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diperoleh Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Anggota DPD Dapil Provinsi NTB dalam sertifikat Model DC-1 DPD sebagai berikut:

Tabel 4.5: Perolehan Suara Sah Anggota DPD Nusa Tenggara Barat Tahun 2014

No.	Data Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah	
		Semula	Menjadi
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Anggota DPD	2.257.369	2.256.632
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	502.713	503.450
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	2.760.082	2.760.082

Sumber: Bagian Teknis Pemilu KPU NTB 2014

Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

Tabel 4.6 : Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. Urut	Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon
1	A. ZULKARNAEN ARIPIN ABDUL MAJID, S.Ag.	111.593
2	H. ABDUL HARIS, M.Sc, M.M.	79.814
3	H. ABDUL KASIM, S.H.	98.958
4	drh. H. ABDUL SAMAD	87.653
5	ANDI MAPPERUMAH, M.S.	89.469
6	Ir. H. BADRUL MUNIR, M.M.	112.261
7	BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H.	187.695
8	DJAIDUN HASAN, S.E., M.M.	55.443
9	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD	152.306
10	HAJI PADLI	95.583
11	HALIMAH TUSA'ADIAH, S.Pd.I.	25.185
12	Ir. ILHAM SABIL	29.429
13	KAHRUL ZAMAN, S.H., M.H.	15.764
14	L. NASRULLAH WIJAYA KUSUMA, S.P., M.H.	27.468
15	TGH. L. NURUL WATHONI S. Pd.I.	42.480
16	H. L. SAHRIAL AKHMADI, S.H.	44.634
17	Drs. LALU AGUS SARJANA	21.654
18	TGH. LALU MALA SAR'I, S.Ag.	71.871
19	Meninggal	
20	Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY	172.375
21	H. LALU WIRATMAJA, S.H.	71.883
22	Ir. H. M. IKHSAN GEMALA PUTRA	16.761
23	Drs. H. M. IKROM	12.226

24	H. M. SUPARJITO, S.Sos.	14.418
25	H. MASYKUR SIMAN	8.524
26	Drs. TGH. MUCHLIS IBRAHIM, M.Si.	61.889
27	MUH. TURMUZI, S.H. M.M.Pd.	19.667
28	H. MUHAIMIN YAHYA, S.Sos.	33.922
29	MUHAMAD MUSANNIP	12.748
30	H. MUHAMMAD, S.H.	23.091
31	MUHAMMAD NASRULLAH, S.Ag.	32.414
32	TGH. MUHARRAR MAHFUZ	129.002
33	NAJAMUDDIN UMAR, S.E.	23.676
34	Hj. ROBIATUL ADAWIYAH, S.E.	129.878
35	RUKMAN, S.E.	19.022
36	Ir. Hj. SRI SUSTINI. NS, M.M.	38.991
37	Dr. SUHARYANTO H. SORO, A.CA., S.Pd. M.Pd.	22.306
38	SUPRATMAN, S.E.	19.259
39	THAMRIN MARDJUN	5.920
40	Ir. TJATUR KUKUH SURJANTO	12.695
41	YANI SAGAROA	26.705
	Jumlah Suara Sah Calon	2.256.632

Dari rekapitulasi perolehan suara seperti di atas, maka anggota DPD Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 adalah 1). Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H 2). Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy 3). Prof. Dr. Farouk Muhammad dan 4). Hj. Robiatul Adawiyah, S.E

- **Pemilihan Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2019**

Sesuai Hasil Penetapan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 masing-masing Daerah Pemilihan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nusa

Tenggara Barat periode tahun 2014-2019 masing-masing Daerah Pemilihan dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2014 di Hotel Lombok Raya Mataram.

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor: 767/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-017/2014 Tentang Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.

Tabel 4.7 : Perolehan Kursi Partai Politik masing-masing Dapil Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2014

No	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 1			
1	PDI Perjuangan	Ir. Made Slamet, MM.	12.078
2	Partai Golongan Karya	H. Lalu Darma Setiawan, SH	6.368
3	Partai Gerindra	Drs. H. Abdul Karim, MM.	6.997
4	Partai Demokrat	H. MNS Kasdiono, SH	13.445
5	Partai Persatuan Pembangunan	Drs. H. Muzihir	8.921
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 2			
1	Partai NasDem	H. Lalu Herwanto, SH	6.190
2	Partai Kebangkitan Bangsa	H. Khudari Ibrahim, LC	13.332
3	Partai Keadilan Sejahtera	H. L. Pattimura Farhan, S.Ag	6.476
4	PDI Perjuangan	H. Raden Nuna Abriadi, S.IP	10.047
5	Partai Golongan Karya	H. Umar Said, S. Ag	21.066
6	Partai Golongan Karya	TGH. Muammar Arafat, SH., MH.	17.298
7	Partai Gerindra	Sarifudin, SH.	11.660
8	Partai Demokrat	TGH. Mahalli Fikri	14.924

9	Partai Amanat Nasional	M. Hadi Sulthon, S.Sos.	9.355
10	Partai Persatuan Pembangunan	Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.	12.846
11	Partai Hati Nurani Rakyat	H. Suharto, ST., MM	13.538
12	Partai Bulan Bintang	H. Junaidi ARIF, SP	4.745
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 3			
1	Partai NasDem	Hj. Suryahartin, SP. M.AP	9.807
2	Partai Keadilan Sejahtera	H. Abdul Hadi, SE., MM	9.828
3	Partai Golongan Karya	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH.	10.309
4	Partai Gerindra	Hamja	10.985
5	Partai Demokrat	Drs. H. M. Nasihuddin Badri, M.AP.	9.898
6	Partai Amanat Nasional	Saefuddin Zohri, S.Ag.	7.340
7	Partai Persatuan Pembangunan	Drs. TGH. Hazmi Hamzar, SH.	17.415
8	Partai Hati Nurani Rakyat	H. Rumaksi SJ, SH	16.668
9	Partai Bulan Bintang	H.Machsun Ridwainy, S.Sos, MBA	11.384
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 4			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	M a k m u n, S.Pd.	7.148
2	Partai Keadilan Sejahtera	H. Usmar Iwan Surambian, SE	8.990
3	Partai Golongan Karya	Drs. H. Sahafari Asy'ari	7.438
4	Partai Gerindra	H. M. Sakduddin, SH	5.251
5	Partai Demokrat	Muhammad Guntur Halba.	9.041
6	Partai Bulan Bintang	H. Burhanuddin	13.213
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 5			
1	Partai Keadilan Sejahtera	Johan Rosihan, ST	16.581
2	Pdi Perjuangan	H.M. Husni Djibril, B.Sc.	22.728
3	Partai Golongan Karya	Ir. H. Busrah Hasan, MM	11.567
4	Partai Gerindra	H. Irwan Rahadi, ST	7.408
5	Partai Demokrat	Baijuri Bulkiah, SH.	11.817
6	Partai Amanat Nasional	Burhanuddin Jafar Salam, SH.	10.269
7	Partai Persatuan Pembangunan	Nurdin Ranggabarani, SH., MH.	13.802
8	Partai Hati Nurani Rakyat	Hj. Rahmah HM.	15.885

Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 6			
1	Partai NasDem	Raihan Anwar, SE. M.Si	5.529
2	Partai Kebangkitan Bangsa	HJ. Nurlaela Chaerunisa, SE.	10.338
3	Partai Keadilan Sejahtera	Syamsuddin Majid, SE	10.883
4	PDI Perjuangan	Ahmad Yadiansyah, S.Sos	9.481
5	Partai Golongan Karya	H. Wahidin HM Noer, SE.	12.725
6	Partai Golongan Karya	H. Nurdin, SH.	8.635
7	Partai Gerindra	Mori Hanafi, SE	13.151
8	Partai Demokrat	Misfalah, S.Pd.	16.567
9	Partai Amanat Nasional	Drs. H. Ali Ahmad, SH.	8.256
10	Partai Persatuan Pembangunan	H. Syafriansar, S.Sos.	7.419
11	Partai Hati Nurani Rakyat	Drs. Noerdin H.M JACUB	8.466
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 7			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	TGH. L.G.M. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA.	11.225
2	Partai Keadilan Sejahtera	Yek Agil	7.032
3	Partai Golongan Karya	Drs. H. Humaidi	23.470
4	Partai Golongan Karya	Lalu Satriawandi, ST	8.465
5	Partai Gerindra	L. Fathul Bahri, SP.	14.495
6	Partai Demokrat	H.Moh.Rais Ishak, SH	5.917
7	Partai Amanat Nasional	Lalu Teguh Juangsa Putra, ST.	9.934
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 8			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	H. L. Pelita Putra, SH.	8.878
2	PDI Perjuangan	Drs. Ruslan Turmuzi	6.965
3	Partai Golongan Karya	Drs. H. Lalu Wireginawang	11.841
4	Partai Gerindra	H. Lalu Jazuli Azhar, SH., M.Si	10.323
5	Partai Demokrat	Lalu Sudiartawan, SH	14.629
6	Partai Persatuan Pembangunan	Drs. H. M. Adung	6.016
7	Partai Hati Nurani Rakyat	H. Burhanudin, S.Sos.,MM	9.549

Sumber: Bagian Teknis Pemilu KPU NTB 2014

Dari hasil perolehan suara menurut parpol dan dapil maka anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019 maka terpilih sebanyak 65 orang sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 65 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut hanya 5 (lima) perempuan yang terpilih. Adapun asal partai, jumlah terbanyak dari Partai Golongan Karya 11 orang, disusul Partai Demokrat dan Gerindra masing-masing 8 (delapan) orang.

TABEL 4.8 : JUMLAH ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT PARTAI POLITIK TAHUN 2014

Nama Partai Politik	Jumlah Anggota		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Partai NASDEM	2	1	3
PKB	4	1	5
PKS	6	-	6
PDIP	5	-	5
Partai Golkar	10	1	11
Partai GERINDA	8	-	8
Partai Demokrat	8	-	8
PAN	5	-	5
PPP	5	1	6
Partai HANURA	4	1	5
PBB	3	-	3
PKPI	-	-	0
Jumlah	60	5	65

Sumber : Sekretariat Dewan DPRD Provinsi NTB

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019

•



- **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019**

Tahap persiapan adalah Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Tabel 4.9: Rekapitulasi Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Prov. NTB

No.	Kabupaten/Kota	Pemilih			Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah TPS
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
1.	Kota Mataram	141.913	150.306	292.219	6	50	662
2.	Lombok Barat	233.714	241.314	475.028	10	122	1.180
3.	Lombok Utara	78.750	80.334	159.084	5	33	437
4.	Lombok Tengah	353.126	370.833	723.959	12	139	1.762
5.	Lombok Timur	386.177	446.034	832.211	20	254	2.017
6.	Sumbawa Barat	45.194	45.696	90.890	8	64	194
7.	Sumbawa	162.554	168.471	331.025	24	165	933
8.	Dompu	77.928	80.204	158.132	8	81	458
9.	Kab. Bima	174.923	180.858	355.781	18	191	660
10.	Kota Bima	50.632	53.718	104.350	5	38	249
Jumlah		1.704.911	1.817.768	3.522.679	116	1.137	8.552

Berdasarkan DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi NTB selanjutnya melakukan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Juni 2014 menetapkan

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3.522.679 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.704.911 jiwa dan perempuan sebanyak 1.817.768 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 8.552, sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 886/BA/V/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana terlihat dalam tabe 4.9.

Tabel : 4.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi NTB

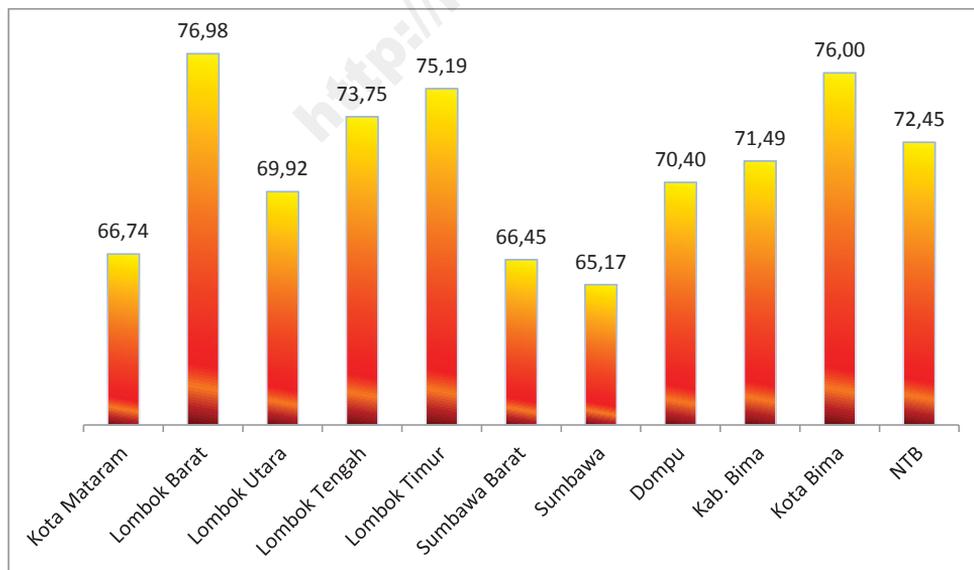
Kabupaten/Kota	Pasangan Calon		Suara Sah	Suara Tidak Sah
	H. Prabowo Subianto & Ir.H.M. Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo & Drs. H. M. Jusuf Kalla		
Kota Mataram	143.741	71.647	215.388	1.455
Lombok Barat	264.566	79.129	343.695	3.435
Lombok Utara	83.339	35.846	119.185	1.667
Lombok Tengah	362.628	129.040	491.668	4.438
Lombok Timur	471.546	155.595	627.141	8.568
Sumbawa Barat	43.934	22.185	66.119	549
Sumbawa	160.055	85.539	245.594	1.651
Dompu	85.635	36.005	121.640	798
Bima	168.840	67.336	236.176	1.622
Kota Bima	59.894	18.916	78.810	398
Jumlah	1.844.178	701.238	2.545.416	24.581
Prosentase	72,45%	27,55%	99,04%	0,96%

Sesuai Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 983/BA/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Rincian Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil

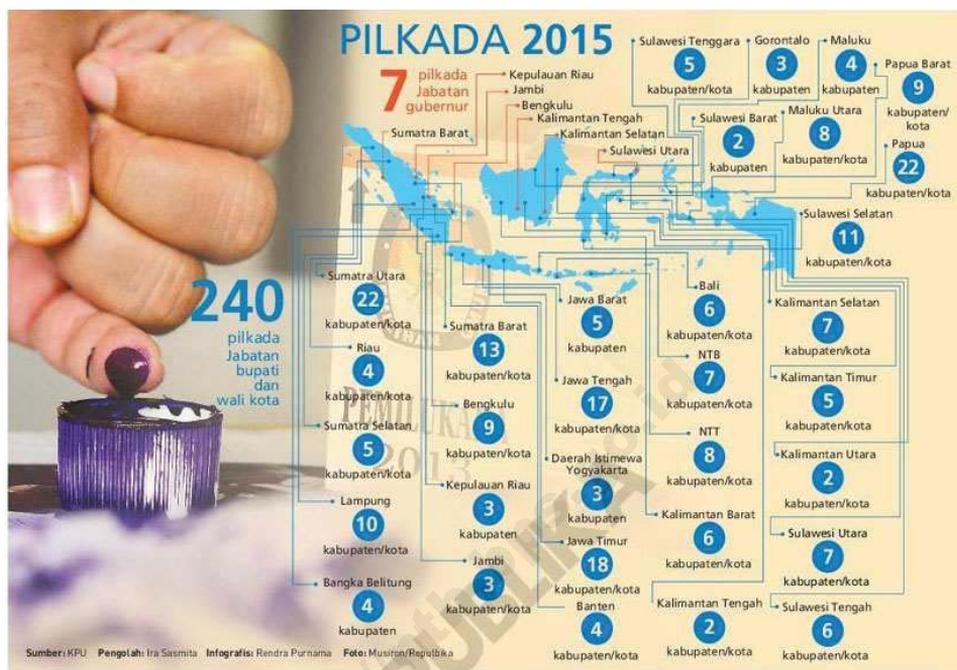
Presiden di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, seperti tabel 4.10. Di mana calon H. Prabowo Subianto & Ir.H.M. Hatta Rajasa memperoleh suara yang sangat banyak yaitu mencapai 1.844.178 (72,45 %) suara, sementara itu calon presiden Ir.H.Joko Widodo & Drs. H. M. Jusuf Kalla hanya sebanyak 701.238 (27,55%) suara.

Untuk perolehan suara masing-masing calon pasangan presiden/wakil presiden menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 4.3. Terlihat calon pasangan Presiden/Wakil Presiden H. Prabowo Subianto & Ir.H.M. Hatta Rajasa menang mutlak di semua kabupaten/kota dibandingkan calon presiden/wakil presiden Ir.H.Joko Widodo & Drs. H. M. Jusuf Kalla. Bahkan ada 6 (enam) kabupaten/kota dengan perolehan suara di atas 70 persen dan 4 (empat) perolehan suara di atas 60 persen.

Gambar 4.3 : Persentase Perolehan Suara sah Pemilihan Umum Calon Presiden/Wakil Presiden periode 2014-2019



- **Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten/Kota tahun 2015**



Pemerintah dan DPR telah sepakat menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2015. Pilkada serentak dilaksanakan di daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Terdapat 272 daerah yang akan menggelar pilkada. Terdiri atas 204 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya tahun 2015. Dan 68 daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan hingga Juni 2016.

Pada tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) dari 10 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk pasangan calon (paslon) bupati - wakil bupati dan pasangan calon wali kota-wakil wali kota. Diantara ketujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada pada 2015 tersebut adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Untuk 3 (tiga) kabupaten/kota lainnya, yaitu

Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur bersamaan dengan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur NTB pada 2013, sedangkan Kabupaten Lombok Barat setelah pemilihan gubernur.

Di pulau Lombok sebanyak 3 kabupaten/Kotamadia yaitu Kab Lombok Utara 2 paslon, Lombok tengah 4 paslon, Kota Mataram 2 paslon. sementara di pulau Sumbawa yang mencakup 5 kabupaten/kota hanya Kota Bima saja yang tidak termasuk yaitu Kabupaten Sumbawa 3 paslon, Kabupaten Sumbawa Barat 4 paslon, Kabupaten Dompu 4 paslon dan Kabupaten Bima 4 paslon. Lebih jelasnya Nama pasangan calon pemilukada bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dapat dilihat pada tabel 4.11.

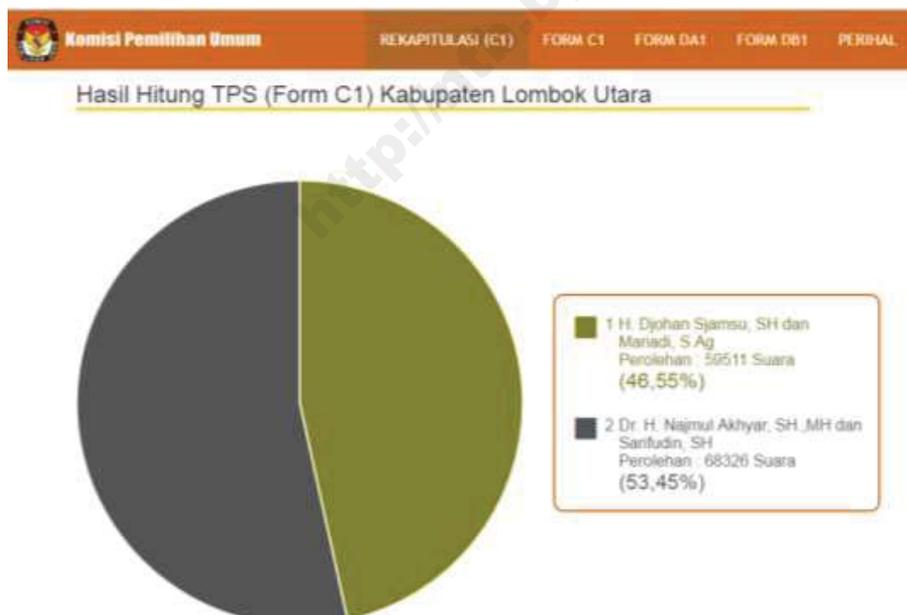
Tabel 4.11 : Nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

Nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Kotamadia Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015							
No	Daerah Pemilihan	No Paslon	Calon Bupati / Walikota	Sex	Calon Wakil	Sex	Pendukung
1.	Kab. Lombok Utara	1	Dr. H. NAJMUL AKHYAR, SH.,MH	L	SYARIFUDIN, SH	L	PDI-P, Partai Gerindra, PAN, PKB, PBB
		2	H. DJOHAN SJAMSU, SH	L	MARIADI, S.Ag	L	Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, Nasdem, PKS, PKPI
2	Kota Mataram	1	H. AHYAR ABDUH	L	H. MOHAN ROLISKANA	L	Partai Golkar, PKS, PKB, Partai Hanura, PAN, PKPI, Partai Nasdem
		2	H. SALMAN, SH	L	Drs. JANA HAMDIANA	L	Partai Golkar
3	Kab. Lombok Tengah	1	DRS.KURNIAWAN ARMIN, MM	L	DRS. H.MAHDAN HARKAN	L	PERORANGAN
		2	H. LALU WIRATMAJA, SH	L	Ns. H.BADRUN NADIANTO, S.Sos.S.Kep.M.Pd	L	PERORANGAN
		3	H. MOH. SUHAILI FT, SH	L	LALU PATHUL BAHRI,S.IP	L	Partai Gerindra, PKS
		4	H.L. SUPRAYATNO, SH.MM	L	ZAENUL AIDI, S.P	L	Partai Demokrat, PBB, PDI-P, PKPI

		5	H.SUHARTO	L	HJ.LALE WIDARE, SH	P	PERORANGAN
		6	TGH. LALU GEDE M. ALI WIRASAKTI AMIR MURNI,LC.MA	L	H.L. AHMAD WIRAJAYA	L	Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB
4.	Kab. Sumbawa Barat	1	DR. IR. W. MUSYAFIRIN, MM	L	FUD SYAIFUDDIN, ST	L	PDI-P, PBB, PKPI, PKS, PKB, Partai Nasdem
		2	DRS. H. MALA RAHMAN	L	IWAN PANJIDINATA, SE	L	Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra
		3	DRS. HM. NUR YASIN	L	MASRA JAYADI	L	PAN, Partai Hanura
		4	KUSMAYADI, ST.,SKM., MM., MARS	L	DRS.H. KHAIRUDDIN KARIM,MH	L	PERORANGAN
5.	Kab. Sumbawa	1	H. ASAAT ABDULLAH, ST	L	CHANDRA WIJAYA RAYES, ST	L	Partai Hanura, Nasdem, PKPI
		2	H. M. HUSNI DJIBRIL, B.SC	L	Drs. H.MAHMUD ABDULLAH	L	PDI-P, Partai Demokrat
		3	JACK MORSA H. ABDULLAH, S.ADM	L	H. IRWAN RAHADI, ST	L	Partai Gerindra, PKS, PBB
6	Kab. Dompu	1	Drs. H. BAMBANG M. YASIN	L	ARIFUDDIN, SH	L	Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura
		2	H. ABUBAKAR AHMAD, SH	L	KISMAN, SH	L	PPP, PBB, Partai Golkar
		3	H. MULYADIN, SH,MH	L	KURNIAWAN AHMADI	L	PKS, Partai Demokrat, PDI-P
		4	SYAFRUDDIN, S.A.P	L	RAFIUDDIN, SE	L	PAN,PKB
7	Kab. Bima	1	ABDUL KHAYIR, SH, MH	L	Drs. H. ABDUL HAMID, M.Si	L	PERORANGAN
		2	ADY MAHYUDI	L	DRS. A. ZUBAIR	L	PAN, PKB, PBB
		3	DRS. H. SYAFRUDIN H.M.NUR.,M.PD	L	DRS. H. MASYKUR HMS	L	Partai Nasdem, PDI-P, Partai Demokrat
		4	HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI	P	DRS. DAHLAN M. NOER	L	Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura

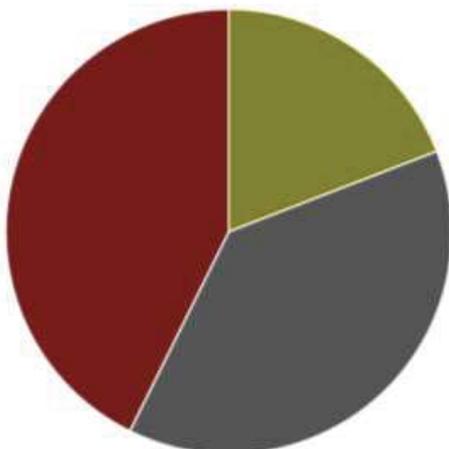
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB

Gambar 4.4 Hasil Rekapitulasi Perorelahan Suara Masing-masing Calon Pasangan Pemilukada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015





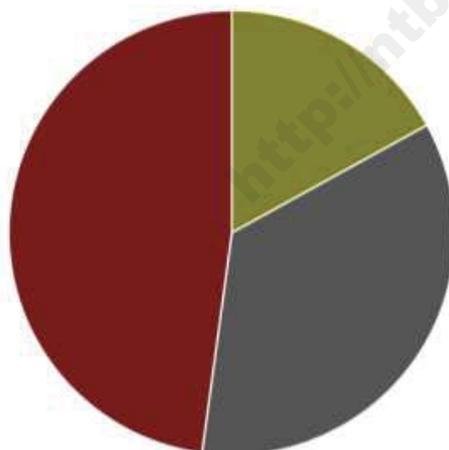
Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Sumbawa Barat



- 1 Drs. H. Mala Rahman dan Iwan Panjadinata, S.E
Perolehan : 13761 Suara
(19,11%)
- 2 Drs. HM. Nur Yasin dan Masra Jayadi, S.E
Perolehan : 27506 Suara
(38,20%)
- 3 Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Fud Syaifuluddin, S.T
Perolehan : 30732 Suara
(42,68%)



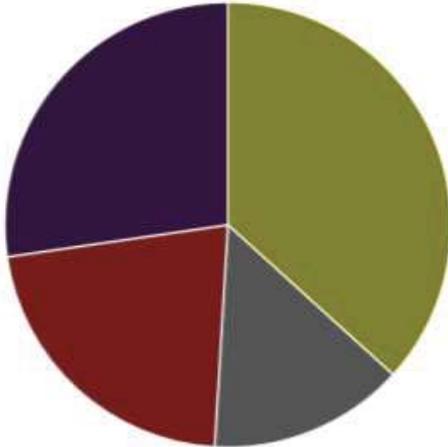
Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Sumbawa



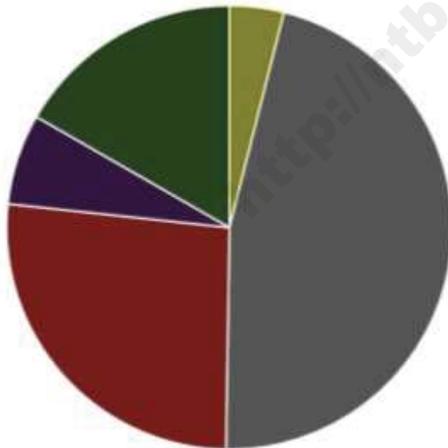
- 1 Jack Morsa H. Abdullah, S Adm dan H. Iwan Rahadi, ST
Perolehan : 41602 Suara
(16,95%)
- 2 H. Asaal Abdullah, ST dan Chandra Wijaya Rayes, ST
Perolehan : 86359 Suara
(35,19%)
- 3 H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah
Perolehan : 117458 Suara
(47,86%)



Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Dompu



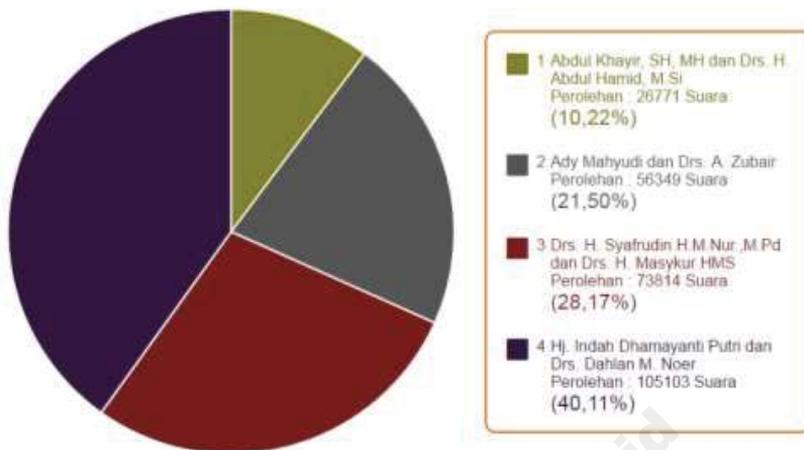
- 1 Drs. H. Bambang M. Yasin dan Ariefuddin, SH
Perolehan : 49979 Suara
(36,74%)
- 2 Syafruddin, S.A.P dan Rafiuddin, SE
Perolehan : 19331 Suara
(14,21%)
- 3 H. Mulyadin, SH, MH dan Kurniawan Ahmadi
Perolehan : 29589 Suara
(21,75%)
- 4 H. Abubakar Ahmad, SH dan Kisman, SH
Perolehan : 37140 Suara
(27,30%)



- 1 H. Lalu Wiratmaja, SH dan Nis H Badrun Nadianto, S.Sos S.Kep M.Pd
Perolehan : 15108 Suara
(3,94%)
- 2 H. Moh. Suhali FT, SH dan L. Pafhul Bahri, S.IP
Perolehan : 213039 Suara
(46,31%)
- 3 TGH Lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc, MA dan H.Lalu Achmad Wirajaya
Perolehan : 121705 Suara
(26,46%)
- 4 H Suharto dan HJ Lake Widare, SH
Perolehan : 30418 Suara
(6,61%)
- 5 H.L. Suprayatno, SH,MM dan Zainul Aidi, SP
Perolehan : 76749 Suara
(16,68%)



Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Bima



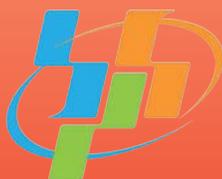
<http://ntb.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<http://ntb.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram 83125
Telp. 0370 621385, Fax. 0370 623801
email : ntb@bps.go.id

